

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KAPANEWON SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 DAN 2018

Dionysius Desembriarto¹ dan Galang Yunawan²

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
08121572137/ desembriarto@gmail.com

²Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
089619413052/ galangyunawan@gmail.com

ABSTRAK

Setiap daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Bantul DI Yogyakarta melaksanakan pembangunan terutama di sektor perekonomian untuk memajukan daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul menunjukkan kinerja yang meningkat dengan semakin bertambahnya kapasitas ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan kinerja perekonomian karena dampak Pandemi Covid-19. Walaupun terjadi kenaikan kesejahteraan, masih terdapat permasalahan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Bantul, yaitu terjadinya ketimpangan capaian kesejahteraan antar kapanewon. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kapanewon tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2013. Peningkatan ketimpangan di tingkat Kabupaten Bantul tersebut disebabkan oleh perbedaan peningkatan pendapatan per kapita yang dicapai oleh tiap kapanewon. Upaya intervensi afirmatif harus dilakukan oleh pemerintah untuk lebih menggiatkan aktivitas perekonomian daerah kurang sejahtera terutama di daerah yang pendapatan per kapita rendah baik di tahun 2013 dan 2018.

Kata-kunci: Ketimpangan Pembangunan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita

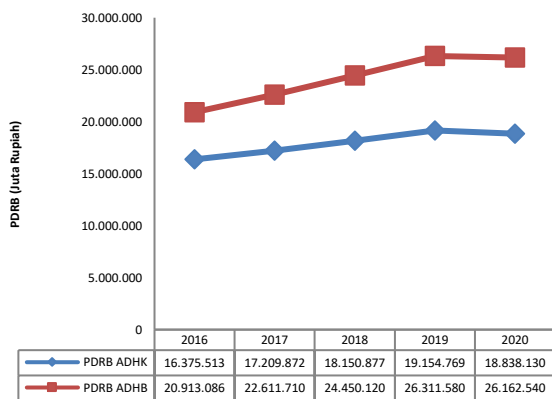
ABSTRACT

Every region in Indonesia, including Bantul Regency, DI Yogyakarta, carries out development, especially in the economic sector to advance the region and improve the welfare of its people. Economic development in Bantul Regency shows increasing performance with increasing economic capacity as measured by Gross Regional Domestic Product (GRDP) and GRDP per capita from year to year, although in 2020 there was a decline in economic performance due to the impact of the Covid-19 pandemic. Although there is an increase in welfare, there are still problems in the economic development of Bantul Regency, namely the occurrence of inequality in welfare achievements between Kapanewon. The results of the analysis show that the level of inequality in economic development between Kapanewon in 2018 increased compared to 2013. The increasing in the inequality was caused by the different of the per capita income increasing achieved by each Kapanewon. Affirmative intervention efforts must be carried out by the government to further intensify economic activities in less prosperous regions, especially in areas with low per capita income both in 2013 and 2018.

Keywords: Inequality of Economic Development, Income Per Capita, Expenditure Per Capita

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia selama ini melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan menciptakan kondisi yang lebih baik di daerahnya. Salah satu aspek pembangunan adalah kesejahteraan ekonomi yang diukur salah satunya dengan pendapatan daerah dan pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan daerah yang dicerminkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan. Namun pada tahun 2020, PDRB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena dampak pandemi Covid-19.

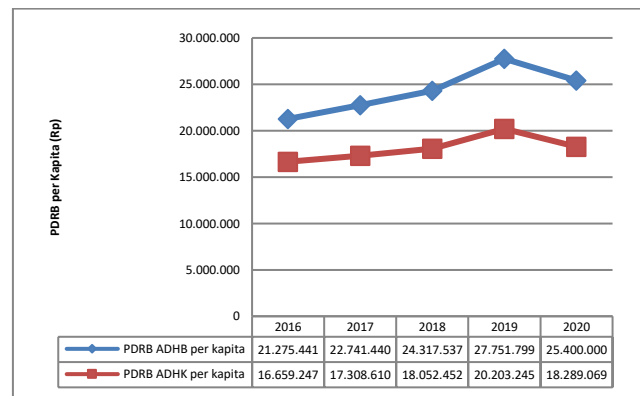


Gambar 1. Grafik Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi DIY

Kenaikan pendapatan daerah disebabkan oleh tumbuhnya perekonomian dan kapasitas ekonomi secara umum di atas lima persen selama masa sebelum pandemi dengan tingkat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,53% di tahun 2019. Pada tahun 2020, perekonomian

Kabupaten Bantul mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar -1,66%. Sementara itu pendapatan per kapita yang diwakili dengan PDRB per kapita juga menunjukkan perkembangan dengan pola yang sama dengan PDRB



Gambar 2. Grafik Perkembangan PDRB ADHB per Kapita dan ADHK Kabupaten Bantul per Kapita Tahun 2016 - 2020 (Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan

Sebagaimana terjadi di berbagai daerah, Kabupaten Bantul dalam menjalani proses pembangunan menghadapi beberapa permasalahan. Salah satu masalah tersebut adalah ketimpangan capaian pembangunan akibat dampak pelaksanaan pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah atau daerah. Meskipun secara regional, pembangunan telah meningkatkan kapasitas ekonomi Kabupaten Bantul namun capaian tersebut tidak dinikmati secara merata oleh semua kapanewon (dahulu kecamatan). Ketimpangan pembangunan merupakan tantangan yang berkelanjutan dan terkini di banyak negara berkembang dan proses pembangunan daerah (Shankar dan Shah, 2003, dan Aini, Harianto dan Puspitawati, 2016). Ketimpangan pembangunan ekonomi mengindikasikan terjadinya ketidakadilan baik antar wilayah maupun penduduk. Hal itu juga

mencerminkan kekurangberpihakan pada pihak yang lemah dan lebih tertinggal. Ketimpangan pembangunan antar daerah akan berakibat pada masalah tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah yang tertinggal atau kurang maju. Lebih lanjut ketimpangan dapat menyebabkan kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang jika berlanjut akan menimbulkan implikasi politik yang buruk dan mengganggu ketentraman masyarakat (Simbolon, 2009).

Pada tingkat kapanewon, tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi Kapanewon Bantul selama ini tidak pernah diukur. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya penghitungan PDRB di tingkat kapanewon. Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kapanewon, penelitian ini ditujukan mengukur tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang dicerminkan dengan ketimpangan pendapatan per kapita. Pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan data proksi pendapatan per kapita karena PDRB per kapita tidak pernah dihitung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul yang lebih komprehensif.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi makro suatu daerah dalam sebuah negara. Nilai PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah tertentu (Bappeda, 2021). Nilai tersebut juga merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB dihitung dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan. PDRB yang merupakan data dasar di Indonesia dihitung oleh Badan Pusat Statistik di tingkat daerah.

Dalam penghitungan menggunakan pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu yang biasanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pada pendekatan pengeluaran, PDRB didefinisikan sebagai semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto yang merupakan ekspor dikurangi impor.

Dalam pendekatan pendapatan, PDRB merupakan penjumlahan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; di mana besarnya adalah sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Secara konseptual, ketiga pendekatan penghitungan PDRB akan menghasilkan angka yang sama. Terdapat dua jenis data PDRB yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Pada PDRB ADHB, nilai barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan harga pada tahun saat PDRB tersebut dihitung. Sedangkan nilai barang dan jasa yang dihitung dalam PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun dasar. Saat ini tahun dasar yang digunakan dalam menghitung PDRB ADHK adalah tahun 2010. Penghitungan

PDRB ADHK ditujukan untuk menghilangkan efek kenaikan harga tiap tahun agar penghitungan PDRB menghasilkan nilai riil pada tahun bersangkutan. BPS menggunakan pendekatan produksi (lapangan usaha) dan pendekatan pengeluaran (penggunaan) dalam penghitungan PDRB.

PDRB PER KAPITA

PDRB per kapita adalah indikator turunan dari PDRB. Indikator ini mengindikasikan nilai output rata-rata yang dihasilkan oleh setiap penduduk daerah yang memiliki nilai PDRB terkait. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk.

PENGELUARAN PER KAPITA DALAM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita merupakan salah satu komponen penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY, 2019). *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan paradigma baru model pembangunan yaitu konsep “Pembangunan Manusia (*Human Development*)” Semenjak tahun 1990 (Sulistiyaningrum, 2019 dan Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY, 2019). Menurut model tersebut, pembangunan manusia dimaknai sebagai upaya memperluas pilihan bagi setiap penduduk untuk mengembangkan dirinya. Ukuran capaian pembangunan manusia diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak (Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY, 2019). Dalam IPM, dimensi

kesehatan, diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir. Dimensi pengetahuan dasar diukur dengan gabungan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan, dimensi hidup layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli (KDB). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dicerminkan oleh rata-rata besarnya pengeluaran per kapita (Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY, 2019).

PENDAPATAN PER KAPITA

Pendapatan per kapita adalah rata-rata besarnya pendapatan penduduk dan suatu wilayah atau negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional/daerah suatu negara atau daerah dengan jumlah penduduk Negara atau daerah tersebut pada suatu periode tertentu. Pada tataran daerah, pendapatan daerah dicerminkan melalui Produk Regional Bruto (PDRB) (Syahrullah, 2012 dalam Hanum, Nurlaila dan Sarlia, 2019). Pendapatan per kapita dapat dipakai untuk melihat tingkat kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun.

Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu indikasi bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan per kapita memperlihatkan pula sejauh mana kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut.

HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau daerah. Pendapatan perkapita merupakan faktor yang sangat penting untuk suatu negara

atau daerah jika pendekatan per kapita naik maka konsumsi masyarakat juga meningkat

Hubungan antara pengeluaran dan pendapatan juga dapat dijelaskan dengan Fungsi Konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu persamaan matematik yang menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi seseorang atau rumah tangga dengan pendapatan disposibel atau pendapatan nasional. Jika fungsi konsumsi merupakan fungsi yang dipengaruhi oleh pendapatan disposibel maka dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut (Sukirno, 2001 dalam Hanum dan Sarlia, 2019):

$$C = a + bYd$$

dimana:

- a : konsumsi autonomus,
- b : kecenderungan mengkonsumsi marginal,
- Yd: pendapatan disposibel

Keynes membuat dugaan-dugaan mengenai fungsi konsumsi berdasarkan instrospeksi dan observasi kasual. Dugaan tersebut di antaranya adalah kecenderungan mengkonsumsi marjinal, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata dan konsumsi tersebut dipengaruhi oleh pendapatan serta tidak memiliki hubungan yang penting dengan tingkat bunga. Kecenderungan mengkonsumsi marjinal (*Marginal Propensity to Consume*/MPC) maksudnya adalah tambahan jumlah yang dikonsumsi apabila adanya tambahan pendapatan yang memiliki nilai antara nol hingga satu

UKURAN PERSEBARAN

Ukuran variasi digunakan untuk memperoleh gambaran yang lengkap atas data yang dianalisis. Salah satu ukuran persebaran dalam ilmu Statistik adalah Standar Deviasi. Semakin besar nilai Standar Deviasi

menunjukkan tingkat penyebaran nilai data yang semakin besar. Penghitungan Standar Deviasi diturunkan dari penghitungan Varians (Ragam). Adapun rumus menghitung Varians adalah:

$$\sigma^2 = (\sum X_i^2 - ((\sum X_i)^2/N))/N$$

Sedangkan rumus menghitung Standar Deviasi adalah:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Dengan:

- X_i = Nilai variabel tiap kasus
- N = Jumlah kasus

INDEKS WILLIAMSON

Seorang akademisi bernama Jeffry G. Williamson mengembangkan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah yaitu Indeks Ketimpangan Daerah. Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin kecil nilai indeks tersebut maka tingkat ketimpangannya semakin kecil, sebaliknya ketimpangan semakin besar jika nilai indeks semakin mendekati 1. Tingkat ketimpangan yang diukur oleh Indeks Williamson tersebut menunjukkan ketimpangan yang terjadi di daerah tingkat di bawahnya. Misalnya, Indeks Williamson Kabupaten menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antara Kecamatan di Kabupaten tersebut. Rumus penghitungan Indeks Williamson dapat ditulis sebagai berikut (Bappeda, 2021):

$$IW = \sqrt{\frac{\sum_i (Y_i - Y)^2 f_i/n}{Y}}$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson
 Y_i = PDRB per kapita Kecamatan i
 Y = PDRB per kapita Kabupaten
 f_i = Jumlah penduduk Kecamatan i
 n = Jumlah penduduk Kabupaten

KOEFISIEN KORELASI

Hubungan antar dua variabel dapat dianalisis dengan menggunakan penghitungan Koefisien Korelasi. Rumus menghitung Koefisien Korelasi adalah (Siagian dan Sugiarto, 2000):

$$r = \frac{(n\sum XY - \sum X \sum Y)}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

r = Koefisien Korelasi
 X = Variabel pertama
 Y = Variabel kedua
 n = Jumlah kasus

Nilai Koefisien Korelasi adalah berkisar antara -1 dan 1, dengan kriteria:

- r = 0 menunjukkan bahwa kedua variabel tidak berhubungan
- r = -1 menunjukkan bahwa kedua variabel berhubungan negatif sempurna
- r = 1 menunjukkan bahwa kedua variabel berhubungan positif sempurna

Sementara tingkat kekuatan hubungan dapat dikelompokkan dalam kriteria berikut ini (Siagian dan Sugiarto, 2000):

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kekuatan Hubungan

Nilai Absolut r	Kriteria Kekuatan Hubungan
0	Tidak ada Korelasi
0 – 0,5	Korelasi Lemah
0,5 – 0,8	Korelasi Sedang
0,8 - 1	Korelasi Kuat
1	Korelasi Sempurna

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis data di Kapanewon se Kabupaten Bantul pada tahun 2013 dan 2018. Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah:

- a. Pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penelitian ini besaran padahal variabel pengeluaran per kapita yang digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli dalam penghitungan IPM. Penelitian ini menggunakan data pengeluaran per kapita Kabupaten Bantul dan Kapanewon di seluruh kabupaten tersebut. Data pengeluaran per kapita kabupaten digunakan dalam regresi fungsi konsumsi untuk mendapatkan keterkaitan antara pengeluaran per kapita dan pendapatan per kapita. Data pengeluaran per kapita dirilis oleh BPS Provinsi DIY setiap tahunnya sebagai bagian dari penghitungan IPM. Penelitian ini menggunakan data pengeluaran per kapita Kapanewon yang merupakan bagian penghitungan IPM tingkat Kapanewon. Data ini diproduksi oleh BPS yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY pada tahun 2013 dan 2018. Satuan pengeluaran per kapita adalah Rupiah;
- b. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan per kapita. Dalam model regresi fungsi konsumsi PDRB per kapita menggantikan pendapatan disposibel. Nilai PDRB per kapita akan dihasilkan dari fungsi konsumsi yang menggambarkan pengaruh pengeluaran per kapita terhadap PDRB per kapita. Data PDRB per kapita yang digunakan dalam persamaan regresi tersebut adalah PDRB per kapita tingkat kabupaten/kota. Sedangkan PDRB per kapita tingkat Kapanewon dihitung dari penerapan fungsi konsumsi yang sudah dihasilkan sebelumnya. Satuan PDRB per kapita adalah Rupiah;

c. Jumlah penduduk per kapanewon adalah data jumlah penduduk tiap kapanewon di Kabupaten Bantul yang dirilis oleh BPS Kabupaten Bantul. Satuan jumlah penduduk

Penelitian ini menerapkan metode yang meliputi beberapa langkah untuk mendapatkan persebaran pendapatan per kapita antar kapanewon. Tingkat persebaran tersebut digunakan dalam menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kapanewon. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Melakukan regresi persamaan fungsi konsumsi untuk mendapatkan pengaruh pendapatan per kapita terhadap pengeluaran per kapita tingkat kabupaten dengan menggunakan data *time series* 2013 - 2018;
2. Menghitung pendapatan per kapita tingkat kapanewon menggunakan hasil fungsi regresi pada langkah 1 dengan menggunakan data pengeluaran per kapita kapanewon. Data pendapatan per kapita adalah data tahun 2013 dan 2018;
3. Menghitung ketimpangan pendapatan per kapita antar kapanewon tahun 2013 dan 2018 dengan menggunakan data pendapatan per kapita yang dihitung di poin 2 dan jumlah penduduk di tingkat Kapanewon pada tahun 2013 dan 2018. Penghitungan ketimpangan menggunakan Standar Deviasi dan Indeks Williamson;
4. Menghitung Koefisien Korelasi untuk mengukur tingkat hubungan antara pendapatan per kapita awal periode dengan peningkatan pendapatan per kapita.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi

Data pengeluaran per kapita dan pendapatan per kapita tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pengeluaran dan Pendapatan per Kapita Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2018

Tahun	Pengeluaran per Kapita	Pendapatan per Kapita
2013	13.902	14.929
2014	13.921	15.479
2015	14.320	16.046
2016	14.880	16.650
2017	14.995	17.292
2018	15.386	18.030

Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan

Regresi yang dilakukan terhadap di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Sementara nilai adjusted R^2 menunjukkan nilai 0,948 yang berarti bahwa 94,8% variasi pengeluaran per kapita dapat dijelaskan oleh variasi pendapatan per kapita. Output hasil regresi dan persamaan regresi yang mencerminkan pengaruh tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Output Regresi Pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap Pengeluaran per Kapita

Variabel	Koefisien	P-Value (Sig.)
Konstanta	6.045,995	0,002
Pengeluaran per Kapita	0,5194565	0,001
$R^2 = 0,9587$ Adj $R^2 = 0,9483$		

Sumber: olahan

Pengeluaran per kapita = 6.045,99 + 0,519

Pendapatan per kapita

Penghitungan Pendapatan per Kapita tingkat Kapanewon

Berdasarkan hasil regresi, pendapatan per kapita tingkat kapanewon dihitung dengan menggunakan regresi pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan wilayah di atas hirarki Kapanewon terkait. Data pengeluaran per kapita tingkat kapanewon dan hasil penghitungan pendapatan per kapita tingkat kapanewon adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Pengeluaran per Kapita dan Pendapatan per Kapita antar Kapanewon tahun 2013 dan 2018 (dalam Rupiah)

Kapanewon	Pengeluaran per Kapita		Pendapatan per Kapita	
	2013	2018	2013	2018
Srandakan	13.872,00	14.103,00	15.065,76	15.510,45
Sanden	13.888,00	17.347,00	15.096,56	21.755,44
Kretek	13.908,00	15.392,00	15.135,06	17.991,89
Pundong	13.877,00	16.092,00	15.075,38	19.339,45
Bambanglipuro	13.879,00	13.926,00	15.079,23	15.169,71
Pandak	13.885,00	13.931,00	15.090,78	15.179,34
Bantul	13.902,00	18.224,00	15.123,51	23.443,74
Jetis	13.884,00	18.202,00	15.088,86	23.401,39
Imogiri	13.898,00	16.153,00	15.115,81	19.456,88
Dlingo	13.872,00	13.918,00	15.065,76	15.154,31
Pleret	13.883,00	15.758,00	15.086,93	18.696,47
Piyungan	13.889,00	13.935,00	15.098,48	15.187,04
Banguntapan	13.920,00	14.828,00	15.158,16	16.906,14
Sewon	13.916,00	17.569,00	15.150,46	22.182,81
Kasih	13.917,00	18.244,00	15.152,39	23.482,25
Pajangan	13.873,00	13.919,00	15.067,68	15.156,24
Sedayu	13.897,00	15.380,00	15.113,88	17.968,79

Sumber: Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY serta olahan

Penghitungan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan data pendapatan per kapita yang dihasilkan, nilai Standar Deviasi dan Indeks Williamson menggambarkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kapanewon adalah sebagai berikut:

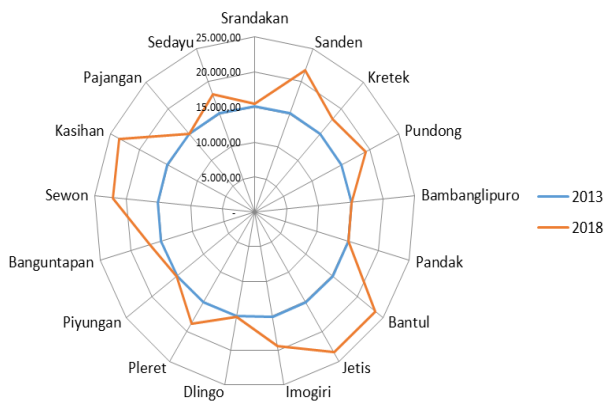
Tabel 5. Hasil Penghitungan Standar Deviasi dan Indeks Williamson atas Pendapatan per Kapita Tahun 2013 dan 2018

Ukuran	Tahun	
	2013	2018
Standar Deviasi (dalam Rupiah)	30,17	3.129,21
Indeks Williamson	0,0023	0,1781

Sumber: olahan

Ketimpangan antar kapanewon mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2018 yang dicerminkan oleh peningkatan nilai Standar Deviasi dan Indeks Wiliamson. Standar Deviasi meningkat dari Rp30,17 menjadi Rp3.129,21 sedangkan Indeks Williamson meningkat dari 0,0023 menjadi 0,1781.

Peningkatan ketimpangan tersebut disebabkan perbedaan pendapatan per kapita yang sangat signifikan antar kapanewon sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Perbedaan capaian pendapatan per kapita tersebut disebabkan oleh kenaikan yang tidak merata di antara kapanewon. Peningkatan terjadi sangat tinggi pada beberapa kapanewon selama tahun 2013 – 2018 seperti Bantul, Jetis, Kasihan, Sewon dan Sanden yang meningkat bahkan di atas 40% sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Di lain pihak, beberapa kapanewon mengalami peningkatan pendapatan per kapita yang rendah seperti Pajangan, Piyungan, Ndlingo dan Bambanglipuro yang meningkat kurang dari 1%.



Gambar 3. Perbandingan Pendapatan per Kapita antar Kapanewon Tahun 2013 dan 2018

Tabel 6. Peningkatan Pendapatan per Kapita Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2013

Kapanewon	Peningkatan Pendapatan per kapita (%)
Srandakan	2,95
Sanden	44,11
Kretek	18,88
Pundong	28,29
Bambanglipuro	0,60
Pandak	0,59
Bantul	55,02
Jetis	55,09
Imogiri	28,72
Dlingo	0,59
Pleret	23,92
Piyungan	0,59
Banguntapan	11,53
Sewon	46,42
Kasihan	54,97
Pajangan	0,59
Sedayu	18,89

Sumber: olahan

Tingkat peningkatan pendapatan per kapita yang tinggi tidak selalu dapat dicapai oleh kapanewon yang pada tahun 2013 telah

mencapai tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi. Kapanewon Banguntapan yang pendapatan per kapita tahun 2013 adalah Rp15.158 ribu dan merupakan kapanewon berpendapatan per kapita tertinggi hanya mencapai peningkatan pendapatan per kapita sebesar 11,53% di tahun 2018. Demikian juga Kapanewon Kretek yang menduduki peringkat pendapatan per kapita tertinggi keempat dengan pendapatan sebesar Rp15.135 ribu hanya meningkat sebesar 18,88%. Di lain pihak terdapat beberapa kapanewon yang relatif sudah maju dan dapat mencapai tingkat peningkatan pendapatan per kapita yang tinggi. Kapanewon Kasihan yang merupakan kapanewon berpendapatan per kapita tertinggi kedua dengan pendapatan sebesar Rp15.152,39 ribu dapat mencapai peningkatan sebesar 54,97%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesejahteraan awal dengan potensi peningkatan pendapatan per kapita tidak ada. Hasil analisis korelasi antara tingkat pendapatan per kapita tahun 2013 dengan peningkatan pendapatan adalah 0,487 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif lemah.

Kenaikan ketimpangan pendapatan per kapita seperti yang dialami Kabupaten Bantul di tahun 2018 dibandingkan tahun 2013 dapat disebabkan oleh faktor perbedaan kondisi demografis yang meliputi antara lain pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ketenagakerjaan (Dhyatmika dan Atmanti, 2013). Meskipun demikian kondisi tersebut dapat diatasi agar disparitas kondisi demografis tidak berpengaruh pada perbedaan dinamika perekonomian dan meningkatkan ketimpangan. Faktor lain yang dapat berpengaruh pada kenaikan ketimpangan adalah kurangnya keberpihakan dan intervensi pemerintah pada daerah yang kurang maju. Alokasi pengeluaran pemerintah yang memadai dan tepat sasaran

dapat meningkatkan dinamika pembangunan di masing-masing daerah terutama di daerah kurang maju sehingga dapat mengurangi ketimpangan antara daerah (Firdaus, 2013). Analisis Dhyatmika dan Atmanti (2013) pada kasus Provinsi Banten mengindikasikan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah akan mengurangi ketimpangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren PDRB dan PDRB per kapita meningkat dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020, kinerja perekonomian menurun karena dampak pandemi Covid-19;
2. Di tingkat kapanewon, pendapatan per kapita mengalami peningkatan namun ketimpangan pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan yang sangat tinggi pada beberapa kapanewon yang mencapai lebih dari 40%, sementara beberapa kapanewon lainnya meningkat rendah bahkan di bawah 1% selama tahun 2013 sampai 2018;
3. Korelasi antara tingkat kesejahteraan awal periode dengan peningkatan pendapatan per kapita adalah positif namun lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa kapanewon yang kurang sejahtera juga mempunyai potensi untuk meningkat lebih tinggi dibandingkan kapanewon yang sudah lebih sejahtera;
4. Pembangunan sektor ekonomi harus lebih diarahkan untuk menggiatkan aktivitas perekonomian di kapanewon yang kurang sejahtera terutama pada kapanewon yang masih tergolong kurang sejahtera di dua periode pengamatan seperti Pajangan dan Dlingo. Peningkatan produktivitas masyarakat dan sumber daya yang memadai

dapat menjadi intervensi penting dalam menggiatkan perekonomian;

5. Intervensi sektor lain yang dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan dinamika ekonomi kapanewon yang kurang sejahtera adalah penyediaan yang memadai atas akses infrastruktur transportasi, komunikasi dan permodalan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aini, Nur Dewi, Harianto dan Herien Puspitawati (2016) Ketimpangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pembangunan Manusia di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8 (1), 71-85
- [2] Azizah, Elda Wahyu, Sudarti dan Hendra Kusuma (2018) Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol 2, Jilid 1
- [3] Banendro, Sigit Dewahyu (2017) *Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 - 2012*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79039>, diakses 30 September 2021
- [4] Bappeda DIY (2021) *Analisis Makroekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta*
- [5] Bappeda DIY dan BPS Provinsi DIY (2019) *Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Kecamatan Daerah Istimewa Yogyakarta*
- [6] BPS Kabupaten Bantul (2014) *Kabupaten Bantul Dalam Angka 2014*
- [7] BPS Kabupaten Bantul (2019) *Kabupaten Bantul Dalam Angka 2019*
- [8] BPS Provinsi DIY (2014) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*

- [9] BPS Provinsi DIY (2016) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016*
- [10] BPS Provinsi DIY (2019) *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2019*
- [11] Dhyatmika, Ketut Wahyu dan Hastarini Dwi Atmanti (2013) Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran, *Diponegoro Journal of Economics*, Vol. 2, No. 1, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>, diakses tanggal 26 Juni 2021
- [12] Firdaus, Muhammad (2013) *Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif*, <http://mfirdaus.staff.ipb.ac.id>, Diakses tanggal 25 Juni 2021
- [13] Hanum, Nurlaila dan Sari Sarlia (2019) Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi di Provinsi Aceh, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 1, April
- [14] Munir, Sahibul (2007) *Statistika 1*, <https://sc.syekhnuurjati.ac.id/esscamp>, diakses tanggal 20 Juni 2021
- [15] Riduwan dan Sunarto (2009) *Pengantar Statistika Untuk Penelitian, Pendidikan, Sosial, Ekonomi dan Bisnis*. Alfabeta, Jakarta
- [16] Shankar, Raja dan Anwar Shah (2003) Bridging the Economic Divide within Countries: A Scorecard on the Performance of Regional Policies in Reducing Regional Income Disparities, *World Development*, Elsevier, Vol. 31 (8), August, [http://sciencedirect.com/science/article/pii/S0305-750X\(03\)00098-6](http://sciencedirect.com/science/article/pii/S0305-750X(03)00098-6), diakses 20 Juni 2021
- [17] Siagian, Dergibson dan Sugiarto (2000) *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- [18] Simbolon, Tiur Roida (2009) *Analisis Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera*. 2021 <https://osf.io/xzmr9>, diakses tanggal 25 Juni
- [19] Walpole, Ronald E. (1995) *Pengantar Statistika*. Edisi ke-3. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada lembaga dan pimpinan Bappeda DIY maupun Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) Bappeda DIY untuk memberikan dorongan dan menciptakan suasana kondusif untuk melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bappeda Kabupaten Bantul atas penyediaan instrumen diseminasi hasil penelitian yang berguna untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

BIODATA PENULIS

Penulis 1

Nama	:	Dionysius Desembriarto, SE MSi MA
Jabatan	:	Fungsional Perencana Muda
Instansi Asal	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Instansi Asal	:	Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213
Email	:	desembriarto@gmail.com
Nomor HP	:	08121572137
Alamat	:	Jl. Tembus No, 163 Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman

Daftar karya yang telah dimuat dipublikasikan dan diseminarkan:

1. Analisis Penanggulangan Kemiskinan di DIY (2019)
2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Masyarakat Perdesaan DIY (2020)
3. Analisis Pengaruh Aktivitas Produktif Bekerja dan Menjalankan Usaha dan Kejadian Kemiskinan di Kabupaten Bantul (2020)
4. Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2020)
5. Analisis Ketimpangan Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (2021)

Penulis 2

Nama	:	Galang Yunawan, S.Si.
Jabatan/Tugas	:	Analisis Statistik
Instansi Asal	:	Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Instansi Asal	:	Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213
Email	:	galangyunawan@gmail.com
Nomor HP	:	089619413052
Alamat	:	Karang Tengah RT 03 RW 11 Nogotirto, Gamping, Sleman